



Ketika Keraton Jogjakarta Mewisuda Pejabat Jadi Abdi Dalem

Wali Kota Naik Pangkat, Juga Punya Nama Baru

Keraton Jogjakarta kembali membagikan gelar kepada masyarakat umum. Ada yang baru kali pertama mendapatkan gelar; ada yang memperoleh kenaikan pangkat. Sebanyak 121 warga mengajukan diri untuk memperoleh gelar abdi dalem tersebut.

HERI SUSANTO, Jogja

BANGSAL Kesatrian Keraton Jogjakarta tampak semarak kemarin (4/2). Ratusan orang dengan busana Jawa berkumpul di tempat itu. Tawa kecil beberapa kali terdengar di sela percakapan di antara mereka. Mereka sedang bersiap mengikuti wisuda pemberian gelar dari Keraton Jogjakarta. Namun, gelar kebangsawanan tersebut tidak diberikan atas inisiatif pihak keraton. Gelar diberikan hanya kepada mereka yang mengajukan diri menjadi abdi dalem keraton. Salah satu yang mengajukan gelar "kehormatan" itu adalah Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti. Kemarin pagi dia tampak semringah. Begitu sertifikat gelar diserahkan, dia pun semakin gembira. Senyumnya terus mengembang. Maklum, Haryadi mendapatkan kenaikan pangkat. Dari bupati anom (bupati muda) menjadi bupati sepuh (bupati tua).

Selain itu, Haryadi memperoleh gelar dan nama baru dari keraton. Selama ini dia menyandang gelar dan nama Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) Projo Kusumodipuro. Kini gelar dan namanya menjadi KMT H Projo Kusumodipuro. Haryadi mengatakan, pemberian gelar dari keraton itu dimaknainya sebagai pengabdian.

► **Baca Wali Kota...** Hal 11

Hanya Diberikan kepada Yang Mengajukan Diri

WALI KOTA...
Sambungan dari hal 1

"Tidak lah (untuk memperoleh gaji, Red). Ini sebagai pengabdian saya kepada keraton," kata dia.

Suami Tri Kirana Muslidatun tersebut juga mengungkapkan, gelar istimewa itu diperoleh karena dirinya mengajukan diri jauh hari sebelumnya kepada pihak keraton. Dia sudah mengikuti dua kali wisuda. Sebelumnya dia diwisuda dan mendapatkan gelar dari keraton pada 2009. Saat itu Haryadi masih menjabat wakil wali kota. Selain memperoleh nama ningrat, dia mendapatkan pangkat bupati anom. "Meski ini gelar informal, saya merasa bangga mendapatkannya," tambah dia.

Pejabat lain yang memperoleh gelar adalah Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo. Dia diwisuda untuk kali pertama sebagai abdi dalem. Karena jabatan formalnya bupati, dia langsung memperoleh pangkat bupati anom dengan nama dan gelar baru KMT H Hasto Husododipuro.

Baik Hasto maupun Haryadi se-

pakat memaknai pemberian gelar abdi dalem keraton itu sebagai bentuk pengabdian kepada keraton dan masyarakat Jogjakarta. Mereka menegaskan tak bakal memanfaatkan gelar keraton itu untuk kepentingan pribadi. Tapi semata-mata untuk ikut melestarikan budaya Jawa yang masih kental dalam masyarakat Jogjakarta.

Bagi Hasto, pemberian gelar abdi dalem dari keraton tersebut punya dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat untuk masyarakat. Ini bisa menjadi tonggak reaktualisasi sikap dan budi pekerti warga Jogjakarta. Manfaat kedua, kata Hasto, gelar itu sesuai dengan profesinya sebagai dokter.

"Juru husada itu berarti bisa *mareni*, *ngayomi*, dan *ngayemi* pasiennya. Sekarang ini banyak pasien yang mengharapkan empati dari dokter daripada terapi dokter. Karena itu, dokter perlu dilengkapi dengan sikap *hangayomi* (mengayomi) dan *hangayemi* (menenangkan)," tuturnya.

Pengageng Tepas Pariwisata Keraton Jogjakarta GBPH Prabukusumo menjelaskan, gelar atau wisuda abdi dalem tersebut diberikan setelah masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis. Tanpa ada pengajuan dari yang bersangkutan, pihak keraton tidak akan memberikan gelar kepada warga atau pejabat sekalipun.

Setelah menerima surat permohonan yang berisi data identitas lengkap pelamar serta tujuan mengapa yang bersangkutan ingin menjadi abdi dalem, pihak keraton memverifikasi berkas pelamar yang masuk. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menyaring, menyeleksi, dan mengetahui siapa orang yang mengajukan gelar itu.

"Dulu bapak saya almarhum *suwargi* (Sri Sultan Hamengku Buwono/HB IX, Red) memutuskan untuk memberikan gelar abdi dalem kepada seluruh PNS (pegawai negeri sipil) di DIJ. Tapi, lantaran ada seorang PNS dari luar yang menolak dan mengembalikan gelar itu karena khawatir tidak bisa mengikuti aturan sebagai abdi dalem, kemudian dibatasi yang mengajukan saja yang diberi," jelas Gusti Prabu, panggilan adik Sultan HB X itu.

Atas pengembalian gelar abdi dalem tersebut, Kawedanan Pengageng Panitro Puro itu menambahkan, HB IX kemudian memutuskan hanya memberikan gelar kepada PNS yang mengajukan permohonan. "Ini untuk semua pejabat. Termasuk Pak Hasto dan Pak Haryadi," katanya.

Bukan hanya Haryadi dan Hasto, beberapa pejabat lain juga ikut diwisuda. Di antaranya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ Arie Yuwirin serta Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Jogja Hadi Muhtar. Khusus untuk Arie Yuwirin, keraton memberikan pangkat riyu bupati anom dengan nama baru Nyi R Riya Kismamanggalawati.

Dalam wisuda kemarin juga diwisuda abdi dalem punokawan atau abdi dalem yang bukan berstatus PNS. Jumlahnya 89 orang. Mereka antara lain merupakan pegiat Sekretariat Bersama (Sekber) Keistimewaan. "Intinya, gelar abdi dalem ini adalah pengabdian kepada masyarakat luas," tandas Haryadi. (*/es/ati)

Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005